

PILIHAN PETANI PADA KELEMBAGAAN LAHAN USAHATANI TANAMAN PANGAN DI PARANGGUPITO KABUPATEN WONOGIRI

Suwarto, Mohd Harisudin, Ernoiz Antriandarti
Fakultas Pertanian UNS Surakarta, Jln. Ir. Sutami No. 36A Ska
Email: Suwar_uns@yahoo.co.id

Abstract: The choice of institutional land in farming crops for farmers can be influenced by the situation and condition of the farmers who worked in the institutional field. Institutional land in farms is important, thus it is necessary to know the institutional land that currently exist in a region along with the factors that influence the choice of institutional land for farmers. The study was designed to answer the following research problem: (1) to explore and describe institutional dry land area of research in current conditions, and (2) to identify the factors that influence the choice of institutional dry land on farm crops. The location of research used poor rural areas which are far away from the town, Bandungan Hamlet and Parang Kulon Hamlet, Paranggupito District, southern region of Wonogiri Regency, ± 70 km from the Capital of Wonogiri. The choice of location is relatively far away from the city intended to get comprehensive information on institutional land. There were 32 farm households in both hamlets that have cooperation in institutional land as respondents. This research conducted in-depth survey and assessment. The result of study showed that the cooperation on an institutional land area there are pledge, lease, 'sakap', and lending. Various factors that influence farmers' choices in the institutional area are known, namely: the bargaining position of farmers who work together, the distance of land by farmers, and kinship.

Key words: Farmers' choice, institusional land

Abstrak: Pemilihan lahan kelembagaan di pertanian tanaman bagi petani dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi para petani yang bekerja di bidang kelembagaan. Kelembagaan lahan di peternakan adalah penting, sehingga adalah sebuah kebutuhan untuk mengetahui tanah kelembagaan yang saat ini ada di suatu daerah bersama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan tanah kelembagaan bagi petani. Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) untuk mengeksplorasi dan menjelaskan luas lahan kering kelembagaan penelitian dalam kondisi saat ini, dan (2) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan lahan kering kelembagaan pada tanaman pertanian. Lokasi penelitian digunakan daerah pedesaan miskin yang berada jauh dari kota, Bandungan dan Dusun Parang Kulon Hamlet, Paranggupito Kabupaten Wonogiri, ± 70 km dari Ibukota Wonogiri. Pemilihan lokasi yang relatif jauh dari kota dimaksudkan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang tanah kelembagaan. Ada 32 rumah tangga pertanian di kedua dusun yang memiliki kerja sama di tanah kelembagaan sebagai responden. Penelitian ini dilakukan mendalam survei dan penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama di atas lahan tanah kelembagaan ada gadai, sewa, 'sakap', dan pinjaman. Berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan petani di daerah kelembagaan diketahui, yaitu: posisi tawar petani yang bekerja sama, jarak lahan oleh petani, dan kekerabatan.

Kata kunci: pilihan petani, tanah institusional

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lahan adalah faktor produksi penting dalam usahatani, ketersediaan lahan terbatas, hingga dewasa ini penguasaannya bagi para petani Indonesia semakin sempit. Tohir (1991) mengemukakan bahwa pada tahun 1905 luas pemilikan lahan di wilayah Jawa-Madura yaitu sebagai berikut: (1) 31,00% rumah tangga tani rata-rata memiliki lahan seluas 0,27 ha, (2) 41,00% rumah tangga tani rata-rata memiliki lahan seluas 0,63 ha, dan (3) 28,00% rumah tangga tani rata-rata memiliki lahan seluas 2,2 ha. Selaras dengan perkembangan penduduk yang terus bertambah, maka pemilikan lahan bagi petani menjadi semakin terbatas. Biro Pusat Statistik (1995) menginformasikan bahwa selama kurun waktu 1993 hingga 2003, jumlah rumah tangga tani pengguna lahan di Indonesia rata-rata setiap tahun bertambah 1,54%, luas penguasaan lahan usahatani rata-rata setiap tahun bertambah 1,36%; rumah tangga petani kecil rata-rata setiap tahun bertambah 2,14%, dan buruh tani rata-rata setiap tahun bertambah 4,13%. Petani Kecil di Pulau Jawa pada tahun 2003 meliputi 9.842.000 rumah tangga tani atau kurang lebih 74,21% dari jumlah rumah tangga tani di Pulau Jawa atau 74,26% dari rumah tangga petani kecil di Indonesia (Lampiran 1).

Masalah kepemilikan lahan terbatas, distribusi kepemilikan lahan tidak merata, dan tekanan penduduk yang berat atas lahan menimbulkan kerjasama antara pemilik lahan luas dengan petani berlahan sempit atau petani tidak berlahan

dalam suatu kelembagaan lahan (Hayami dan Kikuchi, 1981; Fujimoto, 1996; Sangwan, 2000; Sharma, 2000; Hartono *et al.*, 2001). Dalam hal ini Hayami dan Kikuchi (1981), Kasryno (1984), Gunawan (Taryoto, 1995) menjelaskan bahwa pada kelembagaan lahan terdapat aturan-aturan kerjasama yang disepakati dan dipatuhi oleh suatu masyarakat. Berdasar kelembagaan lahan tersebut penguasaan lahan dalam usahatani dapat dibedakan atas pemilik penggarap, penyakap, penyewa, dan penerima gadai.

Bentuk penguasaan lahan berupa sewa, sakap dan gadai adalah bentuk-bentuk penguasaan lahan yang di dalamnya terdapat pengalihan hak garap dari pemilik lahan kepada orang lain. Bentuk kelembagaan ini sudah menjadi bagian dari masyarakat desa, namun tidak bersifat statis. Dibandingkan gadai, sewa dan sakap memiliki aturan yang lebih lengkap, tidak terlalu merugikan salah satu pihak, sudah ada kejelasan informasi tentang besarnya biaya yang dibebankan, bagian hasil masing-masing pihak, atau tanggung jawab lain yang harus dipenuhi. Pada gadai pemilik lahan cenderung sebagai pihak yang menanggung rugi, karena tidak adanya bagian hasil untuk pemilik lahan, serta kurang jelasnya batas waktu pengalihan hak garap lahan (Tohir 1990; Pakpahan *et al.*, 1992).

Pemerintah melalui Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (penyakapan) yang dikenal dengan UUPBH bermaksud mengatur hubungan antara pemilik lahan dan penyakap agar berlaku imbang pembagian hasil yang adil. Dalam hal ini Partadireja (1972) mengungkapkan bahwa penyakapan di Jawa mengenai

penetapan input dan output masih lebih berdasarkan kepada kebiasaan dari pada kepada UUPBH No. 2 tahun 1960. Pada pembagian output ditemui *maro* atau *mrolimo*, dan pembebanan input kepada penggarap (penyakap). Demikian pula hasil penelitian Darsono (1986) menunjukkan bahwa penyakapan di Kudus masih berdasarkan kepada adat setempat. Perjanjian hanya secara lisan dan tanpa saksi, lama perjanjian hanya satu musim, beban input umumnya (97,5%) ditanggung penyakap.

Penyakapan adalah kelembagaan lahan yang merupakan kerjasama lahan dan tenaga kerja, pada kenyataannya kelembagaan tersebut dapat bersifat dinamis, bisa berbeda pada daerah yang berbeda dengan situasi yang berbeda pula. Hasil penelitian Hartono *et al.* (2001) di Daerah Istimewa Yogyakarta pada lahan sawah menunjukkan bahwa penyakapan paling banyak ditemukan pada ke empat desa yang diteliti. Sistem penyakapan tersebut beragam yaitu *maro*, *mrotelu*, dan *mrolimo*. Di Desa Banyuurip, menurut hasil penelitian tersebut pada musim hujan berlangsung *mrolimo*, dan pada musim kemarau berlaku *maro*. Di lain pihak, hasil penelitian Suwanto (2008) pada lahan kering di Kabupaten Gunung Kidul pada lokasi yang relatif dekat dengan kota, transportasi relatif lancar tidak menemukan penyakapan. Penyakapan diketahui terdapat secara terbatas pada wilayah lahan kering yang relatif jauh dari kota.

Fujimoto (1996) melakukan penelitian kelembagaan lahan pada sentra produksi padi di dua desa di Jawa Barat, Indonesia, dua desa di Malaysia, tiga desa di Thailand, tiga desa di Philipina

mendapatkan bahwa penyakapan dan sewa dipraktekkan di semua wilayah tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pergeseran dari sakap ke sewa di wilayah Penang Malaysia. Penyakapan juga masih ditemui di Philipina, walaupun reformasi agraria di wilayah tersebut melarang penyakapan. Fujimoto menduga bahwa kerjasama lahan dipengaruhi oleh tekanan jumlah penduduk, keterbatasan luas lahan, distribusi penguasaan lahan, dan kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Disamping itu hasil penelitian di Chiang Mai, Thailan dengan pendekatan *logit* mendapatkan bahwa semakin tua pemilik lahan, semakin sempit lahan yang dikerjasamakan, semakin dekat jarak lahan dengan rumah pemilik lahan, semakin sempit lahan milik penyewa atau penyakap maka kerjasama lahan cenderung penyakapan, dan apabila kondisi sebaliknya maka kerja sama dengan sewa. Pergeseran sakap ke sewa juga ditemukan oleh Yokoyama (1995) yang melakukan penelitian di Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut menginformasikan bahwa pergeseran kelembagaan tersebut karena terjadi perubahan jenis budidaya dari padi ke sayuran.

Pilihan petani terhadap bentuk kelembagaan lahan sewa atau sakap dapat dipengaruhi oleh penawaran tenaga kerja untuk usahatani, produktivitas input, kemudahan pengawasan pelaksanaan usahatani. Dalam hal ini Hannig (1988) menjelaskan bahwa jika penawaran tenaga kerja tinggi pada sektor pertanian maka penyakapan yang banyak dilaksanakan. Sebaliknya jika banyak terbuka kesempatan kerja di luar pertanian, penawaran tenaga kerja di

sektor pertanian terbatas, maka sewa menjadi pilihan bagi pemilik lahan. Kasryno (1984) menjelaskan bahwa jika produktivitas input tinggi, seperti responsifnya penggunaan pupuk *anorganik* terhadap hasil produksi pertanian, maka pemilik lahan akan menggarap sendiri lahannya. Demikian pula diadopsinya traktorisasi, sehingga pengolahan lahan dapat dengan cepat dan mudah diawasi, juga menyebabkan petani pemilik lahan memilih menggarap sendiri lahan pertaniannya.

Sangwan (2000) meneliti kelembagaan lahan di Haryana India, wilayah yang paling banyak terdapat kerjasama lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sewa berkembang menjadi model penting dalam kerja sama lahan. Disamping itu, persewaan lahan terbesar, hingga 96,15% dari lahan yang dikerjasamakan terdapat pada daerah persawahan di Kurukshetra, daerah dengan risiko dan ketidak pastian lebih rendah, sebaliknya penyakapan terbesar, hingga 44,82% dari lahan yang dikerjasamakan terdapat pada daerah lahan kering di Bhiwani. Hasil penelitian Sharma (2000) mengenai kelembagaan lahan di 18 tempat di India, mendapatkan bahwa proporsi luas lahan irigasi, penggunaan pupuk, dan mekanisasi bervariasi nyata terhadap variasi luas lahan yang disewakan. Disamping itu, proporsi luas lahan irigasi juga bervariasi nyata terhadap variasi luas lahan yang sakapkan.

Bentuk kelembagaan lahan yang berkembang diduga mengikuti mekanisme pasar. Hannig (1988) mengungkapkan bahwa jika penawaran tenaga kerja tinggi pada pertanian maka pemilik lahan menghendaki penyakapan,

sebaliknya jika penawaran tenaga kerja untuk pertanian terbatas maka pemilik lahan menghendaki sewa. Fujimoto (1996) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pemilik lahan terhadap penyakapan atau persewaan lahan yaitu luas lahan yang dikerjasamakan, luas lahan yang sudah dimiliki penyewa atau penyakap, jarak pemilik lahan dengan lahannya, dan umur pemilik lahan. Sangwan (2000) dan Sharma (2000) menjelaskan bahwa sewa dewasa ini lebih berkembang di India. Fujimoto (1996) mengungkapkan bahwa penyakapan tidak dianjurkan di Philipina, namun penyakapan masih berlangsung di masyarakat tersebut. Di samping bagi pemilik lahan, kelembagaan lahan yang berkembang sangat berarti terutama bagi para petani pengguna lahan yaitu bagi para petani penyewa dan penggarap lahan.

Pilihan kelembagaan lahan pada usahatani tanaman pangan bagi para petani dapat berimbang kepada biaya produksi, penggunaan input dan pemeliharaan atau konservasi lahan. Dalam hal ini penting diketahui kelembagaan lahan yang eksis saat ini pada suatu masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pilihan kelembagaan lahan bagi para petani yang selanjutnya berguna dalam pemberdayaan petani dalam pembangunan pertanian.

Perumusan Masalah

Kelembagaan lahan yang berlaku di masyarakat dapat dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor sosial ekonomi, lingkungan usahatani, ataupun karakteristik petani yang bekerjasama dalam kelembagaan lahan.

Lingkungan sosial ekonomi berupa jauh dekat domisili para petani dengan pasar atau kota, dapat berkorelasi dengan komersialisasi usahatani ataupun peluang usaha bagi para petani, baik pada *off farm*, dan *non farm*. Bagi para petani yang berjiwa komersial, kemandirian pengambilan keputusan dalam beragribisnis sangat dipentingkan, sehingga mempengaruhi pilihan dalam bekerjasama pada lahan. Jika demikian maka para petani akan memilih sewa dalam kerja sama lahan. Sebaliknya, bagi para petani yang jauh dari kota atau pasar sebagaimana para petani di wilayah Paranggupito, diduga para petani masih relatif *subisten*, dan relatif bertumpu pada *on farm*. Kondisi demikian dapat berkorelasi dengan tingginya penawaran tenaga kerja untuk usahatani yang dapat berpengaruh terhadap pemilik lahan memilih kelembagaan lahan dalam upayanya mendapatkan keuntungan dari sumber daya lahan yang dimilikinya. Kondisi asimetri, yaitu lebih banyaknya para petani yang ingin menyewa atau menyakap lahan menjadikan pemilik lahan berada pada tingkat yang diuntungkan. Dalam hal ini menjadikan nilai sewa lahan meningkat, atau jika terjadi penyakapan maka posisi pemilik lahan lebih tinggi sehingga bisa terjadi hubungan *patron-clin*.

Produktivitas lahan juga dapat berpengaruh terhadap pilihan kelembagaan lahan bagi pemilik lahan. Jika lahan relatif subur, pada umumnya pemilik lahan lebih senang membudidayakan sendiri atas lahan miliknya, sebaliknya jika lahan yang dimiliki relatif tidak subur para petani lebih suka menyewakan atau menyakap lahannya.

Paranggupito adalah wilayah miskin yang jauh dari kota atau pasar, kondisi demikian terbuka peluang bagi anggota masyarakatnya menghadapi masalah ekonomi yang mendesak seperti membiayai pengobatan keluarga yang sakit, melakukan ritual (seperti: kematian, perayaan), menyekolahkan anak, atau kegiatan lain yang mendesak. Jika para petani yang menghadapi kebutuhan tersebut tidak memiliki asset lain yang mencukupi, dan kebetulan memiliki lahan maka terbuka kemungkinan petani tersebut menggadaikan lahan usahatannya.

Kelembagaan lahan sebagai kerjasama antara pemilik lahan dengan para petani yang berlahan terbatas, atau bahkan tidak mempunyai lahan juga dapat dipengaruhi oleh jarak lahan yang dikerjasamakan dan kekerabatan para petani yang bekerjasama. Umumnya jika jarak antara lahan yang dikerjasamakan dengan pemilik lahan tergolong jauh maka pemilik lahan menghendaki sewa, dan jika sebaliknya, maka lebih suka penyakapan. Di samping itu, dimasyarakat tani terutama yang tingkat kekerabatannya sangat dekat maka kelembagaan lahan dapat berlangsung dengan peminjaman. Misalnya seorang anak yang menggarap lahan usahatani milik orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, kiranya pertanyaan penelitian untuk wilayah kantong kemiskinan di daerah terisolir tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Bagaimana kelembagaan lahan tanman pangan pada lahan kering di wilayah penelitian? (2) Faktor-faktor apa

saja yang mempengaruhi pilihan petani terhadap kelembagaan lahan kering?

Tujuan Penelitian

Penelitian dirancang untuk menjawab rumusan permasalahan yaitu: (1) Mengeksplorasi dan mendeskripsikan kelembagaan lahan kering wilayah penelitian kondisi dewasa ini, dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan petani terhadap kelembagaan lahan kering pada usahatani tanaman pangan. Informasi tersebut berguna dalam pengambilan kebijakan pada pembangunan pertanian baik kaitannya dengan ketahanan pangan maupun dalam konservasi pada lahan kering yang dikerjasamakan dalam kelembagaan lahan.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menggunakan wilayah desa miskin jauh dari kota di Dusun bandungan dan Parang Kulon, Desa Parangupito, Kecamatan Parangupito, Kabupaten Wonogiri wilayah selatan, ± 70 km dari Ibukota Kabupaten Wonogiri (BPS Kabupaten Wonogiri, 2007). Pemilihan lokasi yang relatif jauh dari kota, relatif terisolir dimaksudkan agar mendapat informasi yang banyak mengenai kelembagaan lahan mengingat pada lokasi tersebut para petani banyak bertumpu pada usahatani dalam perilaku kehidupannya. Dalam hal ini lokasi penelitian adalah wilayah desa yang memiliki kelembagaan lahan paling beragam.

Responden

Responden meliputi 32 KK rumah tangga tani yaitu keseluruhan Rumah tangga yang melakukan kerjasama lahan. Penarikan Rumah Tangga petani responden secara sensus

dengan maksud agar mendapatkan informasi yang representatif dari para petani menurut kelembagaan lahan yang ada di wilayah penelitian.

Data dan Metode Pengumpulannya

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terutama data primer, hasil survai yaitu meliputi data studi eksplorasi pilihan kelembagaan lahan, data profil petani meliputi umur, pendidikan formal, jumlah anggota keluarga, jumlah anggota keluarga yang bekerja, luas pemilikan, dan luas penguasaan lahan. Untuk memperkuat hasil penelitian dilakukan *indep study* dan juga dipergunakan data sekunder yang mendukung seperti data umum sosial ekonomi wilayah penelitian.

Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai kelembagaan lahan pada usahatani di wilayah penelitian selanjutnya data hasil survai dianalisis dengan tabulasi silang. Untuk memperjelas hasil survai dalam pembahasan data juga diperkuat dengan informasi yang diperoleh melalui studi pendalaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilihan Petani dan Pemilik Lahan Dalam Kelembagaan Lahan

Kajian pilihan petani dan pemilik lahan dalam kelembagaan lahan ini dilaksanakan di dua dusun, yaitu Dusun Bandungan dan Karangkulon. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam melihat preferensi kelembagaan lahan, yaitu pilihan kelembagaan lahan sebagai petani dan sebagai pemilik lahan. Karakteristik petani dan pemilik lahan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Karakteristik Petani dan Pemilik Lahan Di Dusun Bandungan dan Karangkulon

Karakteristik	Petani (KK)	Pemilik Lahan (KK)
Jumlah	32	27
Laki-laki	25	21
Perempuan	7	6
Umur (tahun)	53	53
Pendidikan (tahun)	6	5.5
Jumlah anggota keluarga yang bekerja (orang)	3	3
Luas lahan yang dimiliki (m ²)	2393	2835
Luas lahan yang disewa (m ²)	1767	1767
Luas lahan yang disewakan (m ²)	2500	2500
Luas lahan digadai (m ²)	2121	1795
Luas lahan yang digadaikan (m ²)	625	625
Luas lahan yang disakap (m ²)	2881	2550
Luas lahan yang disakapkan (m ²)	0	0
Luas lahan yang dipinjam (m ²)	2500	2500
Luas lahan yang dipinjamkan (m ²)	2500	2500
Total penguasaan lahan (m ²)	4313	4450

Sumber: Data Primer, 2010

Dari tabel di atas diketahui bahwa luas lahan yang digadai dan disakap oleh petani lebih besar daripada pemilik lahan meskipun total penguasaan lahan pemilik lahan lebih besar daripada total penguasaan lahan petani.

Selanjutnya bila dilihat dari pilihan petani sebagaimana terlihat dalam gambar 1. dalam mengusahakan lahannya, mayoritas petani lebih memilih sistem gadai.¹ Sebagian besar petani berlahan sempit di Desa Paranggupito menggadaikan tanahnya kepada petani lain karena terdesak oleh kebutuhan yang agak besar dan mendesak, misalnya

ketika mau memasukkan anaknya ke sekolah, mau menikahkan anaknya dan juga karena sakit yang agak serius dan harus membayar biaya di rumah sakit yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pada dasarnya karakteristik petani tidak ingin kehilangan kepemilikan lahannya, sehingga dengan perjuangan apapun dilakukan untuk mempertahankan kepemilikan lahannya, termasuk digadai adalah pilihan yang rasional menurut petani karena akan kembali menjadi hak miliknya. Usaha yang dilakukan petani untuk bisa menebus lahan gadainya supaya menjadi miliknya kembali dilakukan dengan berbagai macam dan cara, misalnya merantau, bekerja menjadi buruh tani di wilayah-wilayah pertanian subur, ikut menjadi tenaga serabutan (tukang batu) pada proyek-proyek atau pekerjaan bangunan di perumahan, menjadi tukang ojek, menjadi tukang

¹ Lihat Gunawan Wiradi dan Makali "Penguasaan Tanah dan Kelembagaan" dalam Faisal Kasryno(editor) "Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia) hal 66, sistem gadai adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan sdi penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan menebusnya kembali.

becak serta juga menjadi buruh tani atau bekerja apapun di wilayah setempat.

Sulitnya akses petani di Desa Paranggupito ke perkotaan juga memicu petani dalam menggadaikan tanahnya. Sedangkan petani pemilik lahan juga melakukan sistem gadai merupakan pilihan mayoritas di Desa Paranggupito. Hal ini karena, sangat jarang petani yang menjual tanah hak miliknya. Petani baru akan menjual tanah miliknya kalau

kondisinya sudah tidak ada pilihan lain, misalnya perlu biaya yang sangat tinggi untuk biaya rumah sakit, kalau ada pembagian warisan dimana yang mendapatkan bagian warisan sudah menetap di wilayah yang sangat jauh dari tempat asalnya sementara keluarga lainnya tidak mampu untuk membayar/membelinya. Dengan kondisi tersebut tanah akan mengumpul pada orang kaya yang memiliki banyak uang.



Gambar 1. Pilihan Petani dalam Kelembagaan Lahan

Namun demikian petani pemilik yang menerima gadai juga selalu menjalin hubungan baik dan selalu mengembangkan modal sosial di wilayahnya. Bentuk modal sosial yang dilakukan adalah tanah yang didapat dari gadai tersebut juga diberikan kesempatan kepada orang yang menggadaikan tersebut untuk diolah dengan sistem bagi

hasil, ini berarti petani yang menggadaikan tanahnya juga masih ada jalan untuk mempertahankan hidupnya.

Tidak seperti di wilayah lain yang penyakapan menurun (Suwarto, 2008), penyakapan saat ini juga masih banyak ditemukan di wilayah Desa Paranggupito, tercatat sembilan KK melakukan penyakapan lahan. Hal

tersebut dapat sebagai uluran tangan dari yang empunya lahan kepada para petani yang tak berlahan atau kepada para petani yang berlahan sempit. Di samping itu, juga dapat dimaknai sesuai dengan teori

Hannig (1988) bahwa jika penawaran tenaga kerja tinggi maka pemilik lahan menghendaki lahannya untuk disakap dalam upaya mendapatkan nilai guna lahan yang lebih tinggi.



Gambar 2. Pilihan Pemilik Lahan dalam Kelembagaan Lahan

Kelembagaan penguasaan lahan dengan sistem sewa 25% lokasi lahannya berada di satu dusun dan 75% terletak di lain dusun dengan mayoritas status kepemilikan merupakan milik perorangan (75%) dan 25% merupakan lahan lungguh. Kelembagaan penguasaan lahan dengan sistem gadai 27% lokasi lahannya terletak dalam satu dusun dan 73% di luar dusun, dengan status kepemilikan lahan 80% milik perorangan, sisanya lahan lungguh. Pada kelembagaan penguasaan lahan dengan sistem sakap 80% lokasi lahannya terletak di luar dusun dan semuanya berstatus milik perorangan. Sedangkan pada kelembagaan

penguasaan lahan dengan sistem pinjam, 100% lokasinya berada dalam satu dusun.

Sistem sewa biasanya dilakukan dalam kurun waktu 6,25 tahun dengan nilai sewa Rp. 2.500.000,00. Sedangkan sistem gadai periode waktunya lebih singkat, yaitu berkisar 2,73 tahun dengan nilai sewa Rp. 1.918.000,00. Sistem pinjam-meminjam mempunyai waktu kesepakatan yang paling lama, yaitu 9 tahun tanpa adanya kompensasi apapun. Pada sistem bagi hasil sakap untuk input usaha tani 60% menggunakan sistem *maro* atau $\frac{1}{2}$ bagian untuk penyakap. Sedangkan untuk bagi hasil outputnya 60% menggunakan sistem *prol sekawan* atau $\frac{1}{4}$ untuk bagian penyakap.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kelembagaan lahan yang terdapat di Desa Paranggupito meliputi gadai, sewa, sakap, dan peminjaman. Kelembagaan lahan sebagai cerminan kerjasama antar petani dalam tatacara menggunakan lahan dalam usahatani dapat dipengaruhi oleh posisi tawar petani dalam kelembagaan lahan. Gadai banyak dijumpai sebagai wujud posisi tawar pemilik lahan yang lemah karena terdesak kebutuhan mendapatkan uang tunai pada suatu saat. Sewa sebagai bentuk kelembagaan yang memiliki posisi tawar berimbang, sedangkan sakap sebagai upaya pemilik lahan meningkatkan nilai

guna lahan karena banyak penawaran tenaga kerja (buruh tani), dan peminjaman sebagai kerjasama sosial yang memiliki derajat membantu kepada yang lebih lemah.

Saran

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan kelembagaan lahan di wilayah desa miskin tersebut yaitu mengenai seberapa besar penduduk bertumpu pada usahatani, seberapa besar terbuka peluang bekerja pada off farm dan non farm. Selanjutnya sesuai dengan ketahanan pangan, perlu diteliti pengaruh kelembagaan lahan terhadap produktivitas usahatani.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, 2007. *Wonogiri dalam Angka*. BPS Kabupaten Wonogiri dan BAPPEDA Kabupaten Wonogiri.
- Biro Pusat Statistik, 1995. *Sensus Pertanian 1993, Seri A2, Laporan Hasil Pendaftaran Rumah tangga Sub Sektor Padi, Palawija, dan Hortikultura*. Biro Pusat Statistik Jakarta, Indonesia.
- Darsono, 1986. "Masalah Perjanjian Bagi Hasil." *Agro Ekonomi*, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. April 1986:52-59.
- Fujimoto, A., 1996. "Share Tenancy and Rice Production: Lesson from Two Village Studies in West Java." Fujimoto, A. and T. Matsuda (eds). *An Economic Study of Rice Farming in West Java, A Farm Household Survey of Two Villages in Bandung and Subang*. Nodai Research Institute Tokyo University of Agriculture, DGHE-JSPS PROGRAM, Tokyo: 81-99.
- Hannig, W., 1988. *Towards A Blue Revolution*. Gadjah Mada University Press.
- Hartono, S., N. Iwamoto, and S. Fukui, 2001. "Characteristics of Farm Household Economy and Its Flexibility, A Case Study in Central Java Villages." *Proceedings of The 1st Seminar, Toward Harmonization between Development and Environmental Conservation in Biological Production*, February 21-23, 2001, Yayoi Auditorium Graduate School of Agricultural and Life

- Sciences, The University of Tokyo, Japan: 23-30.
- Hayami, Y., and M. Kikuchi, 1981. *Asian Village Economy at the Crossroads, An Economic Approach to Institutional Change.* University of Tokyo Press
- Kasyrino, F., 1984. "Kerangka Analisa Ekonomi Masalah Pedesaan." Kasrino, F. (ed). *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia.* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta:26-42.
- Pakpahan, A., Syafaat, A. Purwoto, H.P. Saliem, dan G.S. Hardono, 1992. *Kelembagaan Lahan dan Konservasi Tanah dan Air.* Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian. Bogor.
- Partadireja, A., 1972. "Mengembangkan Lembaga Bagi Hasil." *Agro Ekonomika.* Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. 3(5):30-52.
- Sangwan, S.S., 2000. "Emerging Credit Demand of Tenants in Haryana." *Indian Journal of Agricultural Economics.* Indian Society of Agricultural Economics, Mumbai. 55 (3): 317-330.
- Sharma, H.R., 2000. "Tenancy Relation in Rural India: A Temporal and Cross-Sectional Analysis." *Indian Journal of Agricultural Economics.* Indian Society of Agricultural Economics, Mumbai. 55 (3): 295-307.
- Suwarto. 2008. Produktivitas Lahan dan Pendapatan Usahatani Tanaman Pangan menurut Kelembagaan Lahan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Gunung Kidul. *SOCA, Jurnal Sosial Ekonomi dan Agribisnis,* Fakultas Pertanian Universitas Udayana. 3 (8): 243-249.
- Taryoto, A.H., 1995. "Analisis Kelembagaan dalam Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Suatu Pengantar." *Prosiding Pengembangan Hasil Penelitian. Kelembagaan dan Prospek pengembangan Beberapa Komoditas Pertanian.* Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian: 1-6.
- Tohir, K.A., 1991. *Seuntai Pengetahuan Usaha Tani Indonesia.* Renata Cipta. Jakarta.
- Yokoyama, S., 1995. "Agricultural Diversification and Institutional Change: A Case Study of Tenancy Contract in Indonesia." *The Developing Economic,* XXXIII (4):374-396.